

HEALTH POLICY PLUS: Indonesia

Gambaran Umum

Health Policy Plus (HP+) adalah proyek lima tahun dengan dukungan dana Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang dilaksanakan oleh konsorsium beberapa mitra kerja USAID, dengan dipimpin oleh Palladium. Dukungan dana untuk kegiatan proyek di bidang HIV berasal dari U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Secara global, HP+ berupaya memperkuat dan meningkatkan kebijakan kesehatan agar tercipta lingkungan yang mendukung penyediaan layanan, perbekalan dan sistem kesehatan yang setara dan berkelanjutan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, HIV, dan kesehatan ibu.

HP+ bekerja erat dengan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan data dan bukti penting yang dibutuhkan pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai prioritas kesehatan nasional dengan lebih efektif dan efisien. HP+ mendukung pemerintah Indonesia menyusun, melaksanakan dan memantau berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membiayai dan menyediakan layanan kesehatan, khususnya di bidang kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta HIV, secara merata dan berkesinambungan. HP+ menerapkan pendekatan “belajar dengan melakukan,” di mana berbagai keterampilan, alat bantu, pendekatan dan metodologi diintegrasikan untuk menjamin keberlanjutan.

Kegiatan Kami

Analisis data kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Hingga saat ini angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih tetap tinggi, walaupun berbagai upaya bersama telah dilakukan pemerintah, sektor swasta dan badan donor. Upaya mengatasi situasi ini merupakan prioritas pemerintah. Di tahun 2016, USAID menugaskan HP+ untuk melakukan

penilaian (*landscape assessment*) tentang peran sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. HP+ bermitra erat dengan Balitbangkes, membangun basis data kesehatan ibu dan bayi baru lahir. HP+ juga meningkatkan kapasitas Balitbangkes menghasilkan bukti kuantitatif untuk perumusan kebijakan, dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang mempengaruhi (determinan) kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Perhitungan biaya penanggulangan HIV di tingkat nasional dan sub-nasional

Walaupun prevalensi HIV di Indonesia relatif rendah, cakupan layanan HIV secara nasional juga rendah. Menurut UNAIDS dan Pemerintah Indonesia, di tahun 2016, hanya 36 persen dari orang yang hidup dengan HIV mengetahui status mereka, dan sekitar 34 persen dari mereka menerima terapi antiretroviral—jadi cakupan pengobatan ODHA hanyalah 12 persen. Untuk membantu pemerintah pusat dan daerah membuat rencana perluasan penanggulangan HIV dan menyusun anggaran, [HP+ menghitung keseluruhan sumber daya HIV yang diperlukan per provinsi dan meneliti beberapa skenario pembiayaan HIV yang memungkinkan](#) yaitu melalui integrasi dengan skema JKN dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan.

HP+ membantu Provinsi DKI Jakarta dan Papua melakukan analisis biaya dan dampak dari perbaikan *cascade* pencegahan dan pengobatan HIV per sub-populasi. HP+ juga mengembangkan alat bantu penyusunan anggaran yang dapat dipakai CSO untuk mengajukan permintaan dana ke pemerintah daerah untuk kegiatan kunci pencegahan dan penjangkauan HIV. Penguatan kapasitas organisasi setempat untuk menggunakan alat bantu ini dilakukan secara kontinu.

Untuk lebih memahami mekanisme pendanaan dan proses pengambilan keputusan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, HP+ meneliti pendekatan yang diterapkan untuk menyusun anggaran dan rencana kerja dengan tujuan membuka peluang pendanaan tambahan untuk kegiatan pencegahan dan pengobatan HIV.

Pembiayaan yang berkesinambungan melalui skema JKN

Di tahun 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan target mencapai cakupan universal di tahun 2019. Di tahun 2016 - 2018, HP+ melakukan [penilaian komprehensif JKN](#) bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penilaian ini menghasilkan data tentang dampak JKN atas sistem kesehatan, pasien, sektor swasta dan kondisi ekonomi sebagai dasar untuk mobilisasi sumber daya dan pembiayaan kesehatan yang lebih efektif melalui JKN, terutama untuk menjamin akses ke layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat miskin dan hampir miskin.

Melalui kemitraan yang erat dengan pemerintah, HP+ terus mengumpulkan data, menyusun konsep rekomendasi kebijakan, dan mendukung uji coba beberapa kebijakan kunci di bidang belanja strategis layanan kesehatan melalui skema JKN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberlanjutan JKN dan efisiensi pembiayaan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta HIV.

Implementasi standar pelayanan minimal

Di tahun 2019, pemerintah Indonesia menetapkan standar pelayanan minimal yang baru untuk bidang kesehatan, yang harus dilaksanakan dengan pendanaan kabupaten/kota. Standar pelayanan minimal berfokus pada layanan preventif dan promotif, yang bersifat melengkapi layanan kuratif dan rehabilitatif yang disediakan melalui JKN.

HP+ mengembangkan alat bantu anggaran dan modul e-learning terkait untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kab/kota menyusun rencana anggaran

bagi SPM. HP+ juga mengembangkan alat bantu dan metodologi bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung dan memantau dana tambahan yang tepat yang diperlukan dalam mendukung kab/kota melaksanakan standar pelayanan minimal.

Pembiayaan kesehatan oleh sektor swasta

Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa salah satu komponen kunci yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan nasional adalah keterlibatan sektor swasta. Kemitraan pemerintah dan swasta sangatlah penting untuk meningkatkan peran masyarakat sipil maupun badan usaha di bidang kesehatan dalam pencapaian tujuan kesehatan nasional. HP+ mendukung pemerintah melaksanakan kemitraan pemerintah-swasta di bidang kesehatan. Ini mencakup penyusunan pedoman teknis untuk kemitraan pemerintah-swasta di bidang non-infrastruktur dan studi kelayakan untuk mengidentifikasi kemitraan dan peluang pembiayaan yang berpotensi. HP+ menelusuri peran skema pendanaan campuran (*blended finance*) sebagai katalisator untuk keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan kesehatan.

Selain kegiatan di atas, HP+ memberi dukungan terhadap berbagai inisiatif pemerintah, termasuk bantuan teknis untuk Kajian Sektor Kesehatan 2018 dan perhitungan biaya RPJMN yang baru, yang dipimpin oleh Bappenas.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi

HP+

Suneeta Sharma, PhD

Project Director

suneeta.sharma@thepalladiumgroup.com

Tel: +1.202.775.9680

HP+ Indonesia

Kristina Yarrow

Country Director

Kristina.Yarrow@thepalladiumgroup.com

Health Policy Plus

1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600

Washington, DC 20004

www.healthpolicyplus.com

policyinfo@thepalladiumgroup.com

Health Policy Plus (HP+) adalah perjanjian kerjasama selama lima tahun yang didanai oleh U.S. Agency for International Development dengan Perjanjian No. AID-OAA-A-15-00051, yang dimulai pada tanggal 28 Agustus 2015. Dukungan dana untuk kegiatan di bidang HIV diperoleh dari U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). HP+ dilaksanakan oleh Palladium, bekerja sama dengan Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell, dan Aliansi Pita Putih Indonesia-APPI (White Ribbon Alliance for Safe Motherhood).

Laporan ini disusun oleh HP+ untuk ulasan U.S. Agency for International Development. Informasi yang disampaikan dalam laporan ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mencerminkan pandangan atau posisi dari U.S. Agency for International Development atau Pemerintah AS.

Foto oleh AStanescue untuk HP+.